

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Munaqasah Strata I Pada
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

AHMAD JUNAIDI
NIM. 11575103037

UIN SUSKA RIAU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
PEKANBARU
2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD JUNAIDI
NIM : 11575103037
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA BULUH MANIS
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN
BENGKALIS

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Rusdi, S.Sos, MA
NIP:19720906 200710 1 002

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan
Administrasi Negara



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP: 19620512 198903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.si
NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD JUNAIDI
NIM : 11575103037
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA BULUH MANIS KECAMATAN BATHIN
SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS
TANGGAL UJIAN : 22 APRIL 2020

PANITIA PENGUJI
KETUA PENGUJI



Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S, SE, M.Si, Ak. CA
NIP: 19751112 199903 2 001

PENGUJI I



Dr. Hj. Sitti Rahma, M.Si
M.SiNIP: 19670801 200501 1 007

PENGUJI II



Muammar Alkadafi, S.Sos,
NIK: 130 712 075

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BULUH MANIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

Oleh

AHMAD JUNAIDI

NIM: 11575103037

Penelitian ini dilakukan di desa BuluhManis kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dan faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur desa. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data skunder. Penelitian ini bersifat deskriptife kualitatif dengan teknik analisis data deskriptife kualitatif yaitu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan metode ini penulis menguraikan serta mengaitkan dengan teori serta memberikan keterangan mendukung menjawab masing-masing indikator, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan di ambil kesimpulan serta saran. Pada penelitian ini indikator yang digunakan adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan desa, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana ekonomi. Indikator ini diambil dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa Ketua Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Urusan Pembangunan (KAUR), Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan RW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Buluh Manis belum terlaksana dengan cukup baik, karena dari keseluruhan perencanaan pembangunannya belum terlaksana dan belum optimal menjalankan semua indikator pelaksanaan pembangunan desa di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Kata kunci : Pelaksanaan, Pembangunan, Infrastruktur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berupa rahmat, hidayah, inayah-Nya, serta kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selawat beserta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang senantiasa tercurah memutar hari-hari penuh perjuangan untuk menjadi insan yang berarti dan agar hamba selalu menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Agar akhir penelitian ini menjadi berguna dan selalu dipenuhi dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dunia dan akhirat.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”** ini merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan ilmu yang penulis pelajari selama ini, oleh sebab itu berbagai masukan dan saran bersifat untuk membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Dengan harapan yang sangat mendalam skripsi ini kelak mampu memberikan kontribusi yang sangat berarti. Teristimewanya kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda tercinta **Sutekno** dan Ibunda tercinta **Ratiyem** yang tidak pernah terputus doa dan harapan agar setiap jerih payah mereka selama ini yang diberikan kepada penulis dapat berguna bagi keluarga dan masa depan, *Insyallah* semua ini juga penulis persembahkan untuk saudara/i tercinta dan tersayang, Sunarti (Almh), Nurhayati, Suratno, Budi Arwan, Eni Sridayawati, dan Sri Wahyuni. Serta kepada orang-orang tersayang penulis ucapkan terimakasih atas bantuan selama ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada:

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. H. Kusnadi M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Drs. H. Promadi M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

Ibu Dr. Leny Nofianti M.S, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

Ibu Dr. Juliana SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

Bapak Dr. Amrul Muzan S. HI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

9. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Bapak Rusdi S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran beliau untuk membimbing, memberikan kemudahan serta memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Bapak DRS. Almasri, M.Si selaku pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultas Syarif Kasim Riau

Kepada Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada perpustakaan Fakultas, Universitas, dan Wilayah yang sudah menyediakan buku rujukan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian ini.

Terimakasih kepada Kepala Desa Buluh Manis dan seluruh pegawai Kantor Desa Buluh Manis serta perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat desa Buluh Manis yang telah memberikan bantuan dan dukungan berupa data dan Informasi kepada penulis selama melakukan penelitian skripsi.

Terimakasih banyak kepada sahabat-sahabat tersayang Saziya Ulfa, Yulia Zora, Nurul atikah, Muhammad Vicky Azri, Viki Rahmad Illahi, Lila Anggriani, Nurfazilah, Mahmuba Rahman, Herryzal, Sahrul Ilham, Ardy yahya, Suhardiman, Danu Prasetyo, Hendri, Wawan, Irfan, Humairah, Aci,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Afifah, Rian, Desri, Putri, dan Anita yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Teman-teman seperjuangan penulis lokal ANA/A yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, serta seluruh teman-teman Jurusan Administrasi Negara angkata 2015.

Pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyusun karya ilmiah ini.

Pekanbaru, 23 Februari 2019
Penulis,

AHMAD JUNAIDI
NIM: 11575103037

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	22
1.4 Manfaat/ Kegunaan Penelitian	22
1.5 Sistematika penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Administrasi Pembangunan	25
2.2 Pembangunan Desa	28
2.3 Infrastruktur.....	33
2.4 Perencanaan Pembangunan.....	35
2.5 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	38
2.6 Otonomi Daerah.....	40
2.7 Otonomi Desa.....	42
2.8 Pandangan Islam tentang Pembangunan.....	48
2.9 Penelitian Terdahulu	48
2.10 Defenisi Konsep	53
2.11 Konsep Operasional.....	54
2.12 Kerangka Pemikiran	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	57
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	57
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	58
3.4 Informan Penelitian.....	58
3.5 Metode Analisis	59
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Bathin Solapan	60
4.2 Gambaran Umum Desa Buluh Manis	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

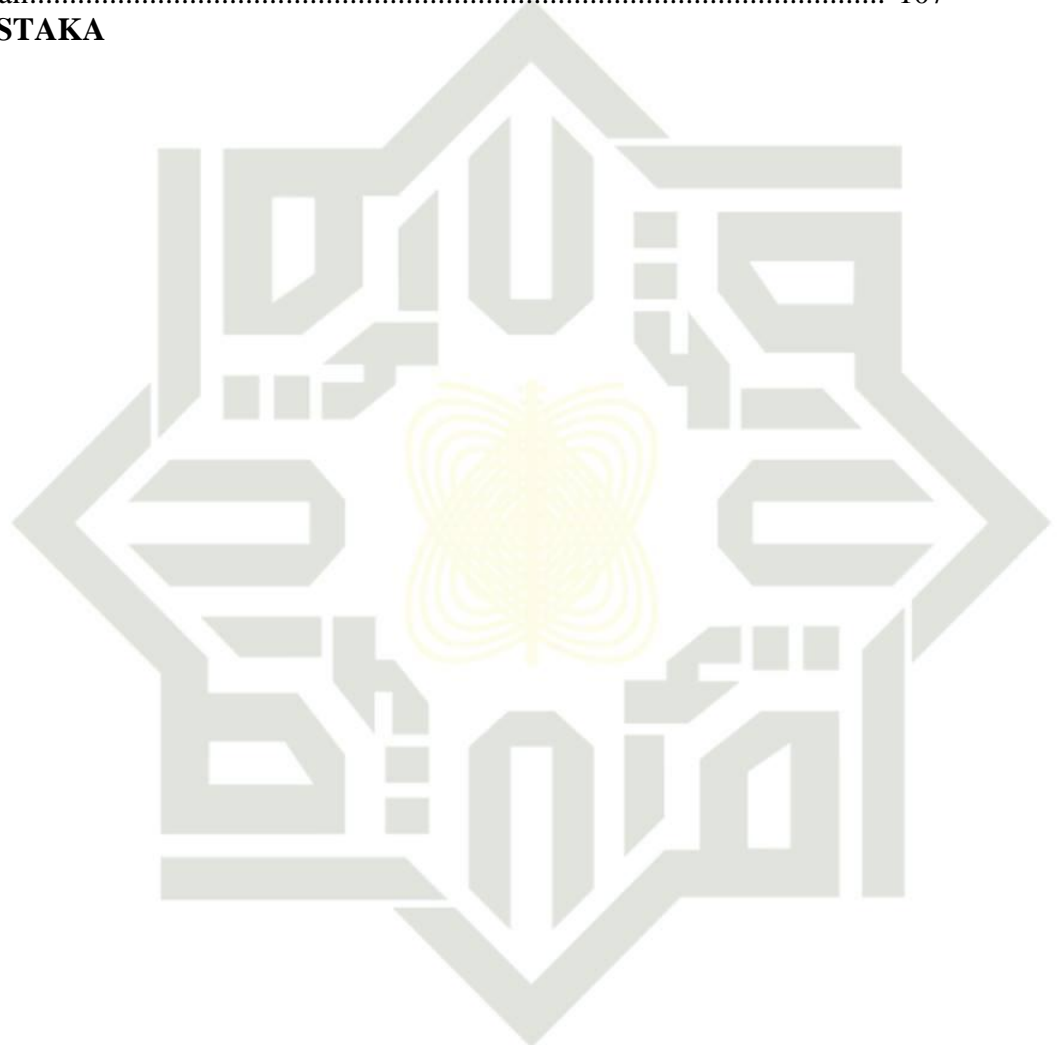
5.2 Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Buluh Manis.....	97
5.3 Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Buluh Manis	102

BAB VI PENTUP

6.1 Kesimpulan	106
6.2 Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

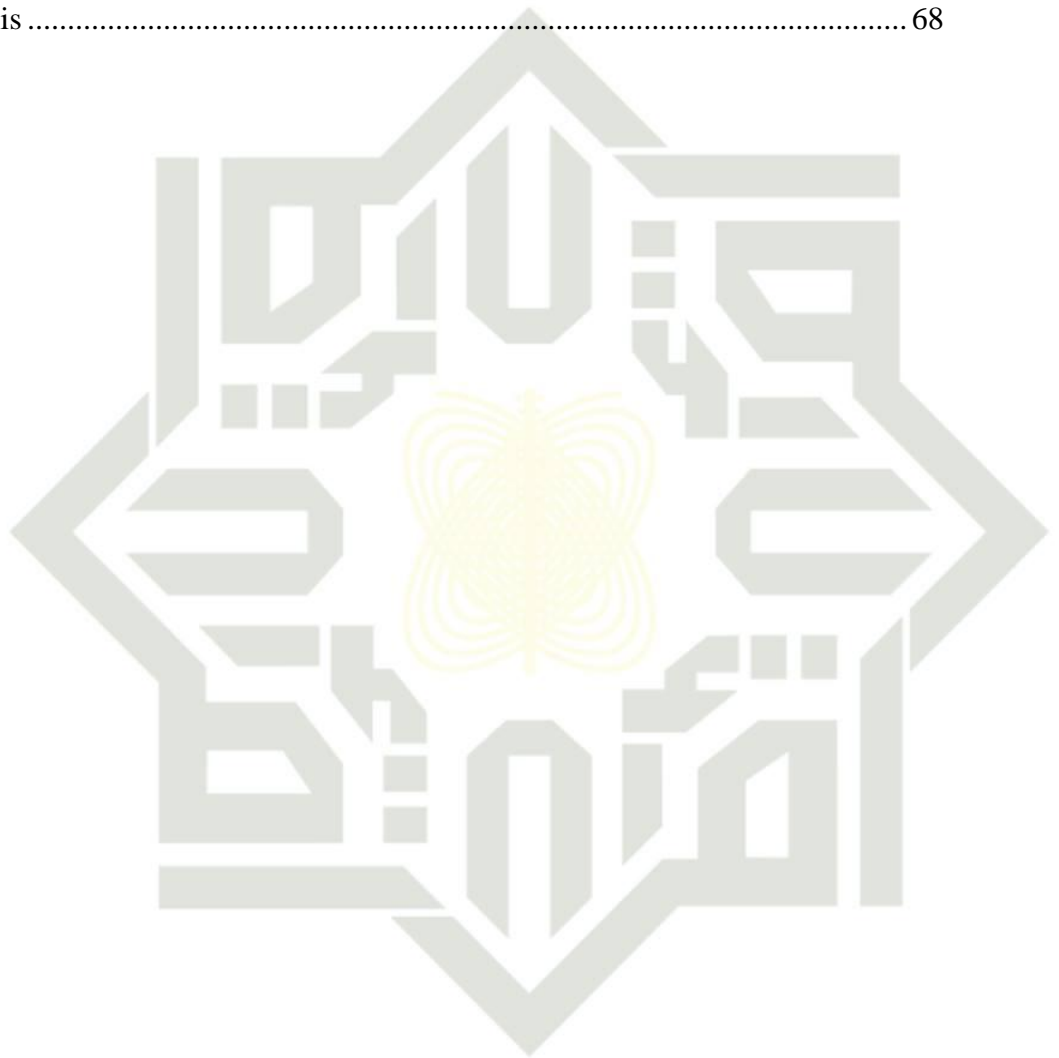
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana Kerja Pembangunan Desa Buluh Manis tahun 2018.....	16
Tabel 1.2 Rencana Kerja Pembangunan Desa Buluh Manis tahun 2019.....	17
Tabel 2.8 Konsep Operasional	54
Tabel 3.1 Daftar Informan	59
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bathin Solapan Menurut Desa/Kelurahan tahun 2018.....	61
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Buluh Manis Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Buluh Manis Berdasarkan Pendidikan	62
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Buluh Manis Berdasarkan Pekerjaan.....	63
Tabel 4.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Buluh Manis tahun 2018	69
Tabel 5.1 Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Buluh Manis tahun 2018	76
Tabel 5.2 Jenis Lingkungan Desa yang Terdapat di Desa Buluh Manis	78
Tabel 5.3 Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Buluh Manis tahun 2018	80
Tabel 5.4 Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Buluh Manis tahun 2019	81
Tabel 5.5 Uraian Dana yang Digunakan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Buluh Manis	85
Tabel 5.6 Jenis Infrastruktur Pelayanan Kesehatan yang Tersedia di Desa Buluh Manis	87
Tabel 5.7 Data Lembaga Pendidikan di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	91

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pemikiran	56
Gambar Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bnegkalis	67
Gambar Struktur Lembaga Swadaya Masyarakat RT/RW Se-Desa Buluh Manis	68



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa di Kabupaten/Kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan Badan Pemerintah Desa (BPD) yang dimaksudkan untuk pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa dan proses pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparaturnya daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjangkau aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, pemerintah juga memandang bahwa Desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selain otonomi asli yang ada selama ini. Sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni Provinsi memiliki otonomi terbatas. Kabupaten/Kota memiliki otonomi luas dan Desa memiliki otonomi asli.

Dengan adanya Otonomi Desa maka Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Pada pasal 3 menyatakan Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten yang cukup berkembang, khususnya di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan. Tetapi hal ini belum bisa dikelola oleh Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan ini disebabkan karena minimnya pembangunan yang bisa mempercepat lajunya perkembangan di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan. Dilihat dari kondisi sekarang ini maka banyak yang harus dibenahi dalam proses pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana di Desa Buluh Manis, hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja pemerintahan Desa Buluh Manis itu sendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam menata sistem pemerintahan terendah di Indonesia, termasuk salah satunya Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dari sistem sentralisasi kembali ke Otonomi Desa dengan tujuan untuk meletakkan kerangka pemerintahan yang kuat dan mampu menjadi basis pengayoman masyarakat pada tingkat tertinggi.

Pemerintah yang ada di desa merupakan suatu organisasi yang ada di pemerintah daerah dan wujud penyelenggaraan urusan pemerintah, oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Terjadinya ketidak merataan suatu pembangunan desa itu bisa berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga masyarakat tersebut, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan desa. Sehingga bukan hanya tugas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi seperti apa solusi yang diberikan pemerintah kabupaten/Kota dalam menyeleksi proyek-proyek pembangunan disuatu desa (e-jurnal, Maya Rosalina, *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*).

Kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah, setidaknya pada tahap awal pembangunan, yang paling utama adalah pembangunan prasarana dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan transportasi, energi irigasi, dan sebagainya. Prasarana sosial mencakup prasarana pendidikan seperti sekolah-sekolah dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit. Di samping sarana fisik, pemerintah juga perlu memperhatikan pembangunan lembaga-lembaga sosial, baik lembaga politik, hukum, budaya, maupun ekonomi. (Afifuddin, 100: 2012)

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut INBUP-PPIP merupakan naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur perdesaan dengan menitikberatkan pada proses pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan infrastruktur perdesaan. Infrastruktur pada desa Buluh Manis sangat berperan penting dalam mendukung aktivitas masyarakatnya dan dapat meningkatkan hubungan antarwilayah seperti perdangan hasil pertanian dan perdagangan.

Berikut penyediaan infrastruktur yang ada di desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis berdasarkan data monografi desa Buluh Manis:

1. Gedung SD, madrasah/MDA
2. Gedung masjid, musholah, gereja
3. Balai pengobatan
4. Jalan tanah dan aspal
5. Jembatan dan aliran pembuangan air (parit)

Pembangunan infrastruktur yang berperan penting yaitu dalam mendukung aktivitas ekonomi adalah dalam aspek budaya, sosial dan kesatuan persatuan bangsa karena hal ini sebagai modal dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan komunikasi antar kelompok masyarakat dan dapat meningkatkan hubungan antar wilayah, hal ini menjadi masukan penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti seperti perdagangan, industri, dan peretanian (e-jurnal, Yuanita Berlin, Irwan Noor dan Siswidiyanto, *Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada Lokasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlibatan masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur perdesaan akan memberikan beberapa dampak, antara lain (1) kualitas pekerjaan yang dihasilkan, (2) keberlangsungan operasional dan pemeliharaan infrastruktur tersebut, (3) kemampuan masyarakat dalam membangun suatu kemitraan dengan berbagai pihak, serta (4) penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam wilayahnya (e-jurnal, Andi Asnudin, *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Perlibatan Masyarakat Setempat*).

Menurut Fajar Suryanto (2009) infrastruktur merupakan suatu rangkaian yang terdiri atas adanya berbagai bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti: pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan, dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur memang diperlukan secara mendalam dan aktif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat.

Agar pembangunan di desa Buluh Manis dapat terlaksana, pemerintah desa merencanakan pembangunan yang dibutuhkan di desanya dengan melakukan musyawarah desa. Menurut pasal 54 pada UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti:

1. Penataan desa
2. Pencanaan desa
3. Kerjasama desa
4. Rencana investasi yang masuk ke desa
5. Pembentukan BUM desa
6. Penambahan dan pelepasan aset desa dan
7. Kejadian luar biasa

Dengan terjadinya musyawarah desa yang telah dilakukan, maka terbentuklah berbagai rancangan atau rencana sebagai target kerja pemerintah desa Buluh Manis dengan mengeluarkan 3 Peraturan Desa (Perdes) pada tahun 2018 sebagai bentuk kebijakan yang mereka keluarkan, yakni PERDES Nomor 09 tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, berisi tentang laporan pelaksanaan anggaran tahun 2017 yang dibentuk oleh BPD Buluh Manis dan Kepala Desa Buluh Manis, kemudian PERDES Nomor 4 tahun 2018 tentang Pungutan Pajak, dan PERDES Nomor 14 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019, dimana rencana pembangunan desa Buluh Manis untuk tahun 2019 dibentuk dengan nama RKPDes Buluh Manis.

Dalam meningkatkan pembangunan desa yang berupa seperti Program Pembangunan Desa atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut keterangan dari Kepala Desa Buluh Manis tersebut, RKPDes tersebut dilaksanakan dalam waktu satu tahun dan apabila dari RKPDes tersebut ada kegiatan yang tidak terlaksana dalam masa yang ditentukan maka akan dimusyawarahkan kembali dan bisa lanjutkan pada RKPDes tahun selanjutnya.

Berikut ini adalah RKPDes Buluh Manis kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tahun 2018 & 2019:

Tabel 1.1 : Rencana Kerja Pembangunan Desa Buluh Manis tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Volume	Terealisasi	Tidak Terealisasi	Persentase
1	Lanjutan Balai Pertemuan	Kantor Desa	10 x 25 m		✓	0%
2	Parit Beton	Jl. Sukajadi RT 03 RW 01	108 x 0,7/0.5 x 0,7 m	✓		100%
3	Parit Bata	Jl. Cucut RT 01 RW 06	100 x 0,4 x 0,5 m	✓		100%
4	Pengerasan Base C	Jl. Talang Pancah II RT 01 RW 05	330 x 5 x 0,15 m	✓		100%
	Pengerasan Base C	Jl. Talang Pancah I RT 01 RW 05	280 x 5 x 0,15 m	✓		100%
	Pengerasan Base C	Jl. Bayduri RT 02 RW 04	280 x 5 x 0,15 m	✓		100%
	Parit Bata	Jl. Lapangan Heli RT 03 RW 07	200 x 0,4 x 0,4 m	✓		100%
	Box Culvert	Jl. Grojokan RT 04 RW 07	1 x 1 x 6 m	✓		100%
	Parit Bata	Jl. PPN RT 04 RW 01	200 x 0,4 x 0,4 m	✓		100%
	Galian Parit	Jl. Sepakat Desa Buluh Manis	2700 x 0,8 x 0,8 m		✓	0%
	Pengadaan Buku/Pustaka Desa	Kantor Desa	1 Ls		✓	0%

2	Parit Bata	Jl. Rangau Km. 14 RT 04 RW 02	190 x 0,6/0,4 x 0,6 m		✓	0%
3	Penimbunan Badan Jalan	Jl. Bayduri RT 02 RW 04	66 m3		✓	0%
4	Parit Bata	Jl. Rangau Km. 15 RT 02 RW 02	140 x 0,4 x 0,4		✓	0%
5	Penimbunan Badan Jalan	Jl. Talang Pancak RT 02 RW 04	165 m3		✓	0%
6	Penimbunan Badan Jalan	Jl. Campu Kota RT 03 RW 05	79 m3		✓	0%

Sumber: Kantor Kepala Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan data diatas bisa terlihat bahwa masih banyak rencana pembangunan yang belum terealisasi atau terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, khususnya bisa dilihat pada urusan pembangunan infrastruktur Balai Pertemuan, Parit Bata, Pengadaan Buku/Pustaka Desa, Penimbunan Badan Jalan, yang merupakan unsur penting dalam mendukung kemudahan aktivitas masyarakat. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa perencanaan juga berfokus pada infrastruktur jalan dan juga infrastruktur pengairan, yang mana pada saat ini juga masih ada lokasi pembangunan yang belum juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tidak terlaksananya rencana pembangunan desa pada tabel diatas menurut informasi dari pegawai kantor desa disebabkan karena dana pembangunan belum bisa direalisasikan dan setiap pembangunan yang ada di RKPDDes perlu dikembangkan dan direncanakan secara matang setiap rinciannya, hingga memakan waktu yang tidak sedikit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Rencana Kerja Pembangunan Desa Buluh Manis tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Volume	Terealisasi	Tidak Terealisasi	Persentase
1	Lanjutan Balai Pertemuan	Kantor Desa	10 x 25 m		✓	70%
2	Semenisasi Jalan	Jl. Pinang Manis RT 02 RW 03	120 x 3 x 0,15 m		✓	0%
3	Semenisasi Jalan	Jl. Musholah RT.01 RW.02	100 x 3 x 0,15	✓		100%
4	Pembangunan Parit Beton	Jl. Rangau km13 RT 01 RW 07	90 m		✓	0%
5	Pengerasan Jalan Base C	Jl. Talang Pancah III RT 01 RW 05	330 x 5 x 0,15 m		✓	0%
6	Pembuatan Menara Tangki Air	Jl. Rangau km.11 RT 01 RW 01	1 paket	✓		100%
7	Pembangunan Pos Siskamling	Jl. Talang Pancah III RT 02 RW 04	1 paket		✓	0%
8	Pembuatan Sumur Bor dan Menara Air	Jl. Lapangan Heli RT.04 RW.07	1 paket		✓	50%
9	Pengadaan Ambulance	Kantor Desa	1 unit	✓		100%
10	Pembangunan Posyandu Mawar Putih	Jl. Sukajadi RT.02 RW.01	3,5 x 5,5 m	✓		100%
11	Penimbunan Jalan	Jl. Talang Pancah I RT 03 RW 05	280 x 0,4 x 0,4 m	✓		100%
12	Pembangunan Gapura Permanen	Jl. Talang Pancah I RT.03 RW.05	1 unit		✓	0%
13	Pengadaan Buku/Pustaka Desa	Kantor Desa	1 Ls		✓	0%
14	Parit Bata	Jl. Rangau Km. 14 RT 04 RW 02	190 x 0,6/0,4 x 0,6 m		✓	0%
15	Penimbunan	Jl. Bayduri	66 m3	✓		100%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Jalan	RT 02 RW 04				
Parit Bata	Jl. Rangau Km. 15 RT 02 RW 02	140 x 0,4 x 0,4	✓		100%
Galian Parit	Jl. Sepakat Desa Buluh Manis	2700 x 0,8 x 0,8 m		✓	0%
Penimbunan Badan Jalan	Jl. Talang Pancah II RT 02 RW 04	165 m3	✓		100%
Penimbunan Badan Jalan	Jl. Campu Kota RT 03 RW 05	79 m3	✓		100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Pada tabel 1.2 diatas terlihat bahwa ada beberapa kegiatan pembangunan desa buluh manis pada tahun 2018 yang dilanjutkan pada RKPDes tahun 2019 seperti Lanjutan Balai Pertemuan yang bertempat di sekitaran Kantor Desa Buluh Manis, Galian Parit yang berada di Jl. Sepakat, Pengadaan Buku/Pustaka Desa yang bertempat di wilayah Kanto Desa Buluh Manis, Parit Bata yang berada di Jl. Rangau Km. 14 RT 04 RW 02, Penimbunan Badan Jalan yang berlokasi di jl. Bayduri RT 02 RW 04, Parit Bata yang berlokasi di Jl. Rangau Km. 15 RT 02 RW 02, Penimbunan Badan Jalan di Jl. Talang Pancah RT 02 RW 04, dan di Jl. Campu Kota RT 03 RW 05.

Pada tabel 1.2 juga dilihat masih ada beberapa kegiatan pembangunan di desa Buluh Manis yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum terlaksana sesuai dengan yang direncanakan pada RKPDes 2019. Kegiatan yang belum terlaksana seperti Lanjutan Balai Pertemuan, Semenisasi Jalan, Pembangunan Parit Beton, Pengerasan Jalan Base C, Pembangunan Pos Siskamling, Pembuatan Sumur Bor dan Menara Air, Pembangunan Gapura Permanen, Pengadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku/Pustaka Desa, Galian Parit, dan Penimbunan Badan Jalan. Tidak terlaksananya rencana pembangunan desa pada tabel diatas menurut informasi dari pegawai kantor desa disebabkan dengan hal yang sama, yakni karena dana pembangunan belum bisa direalisasikan dan setiap pembangunan yang ada di RKPDDes perlu dikembangkan dan direncanakan secara matang setiap rinciannya, hingga memakan waktu yang tidak sedikit dan kondisi iklim yang tidak menentu seperti hujan dan banjir.

Pada saat turun hujan, maka jalan-jalan yang belum dilakukan pengerasan atau penimbunan akan hancur dan itu sangat menghambat aktivitas masyarakat terutama masyarakat yang sedang panen kelapa sawit. Dengan keadaan jalan yang rusak atau hancur tersebut, hasil panen yang biasanya ditimbang atau dijual ke toke sawit (pengusaha sawit) didekat kebun milik masyarakat tersebut, kini masyarakat harus mengantar hasil panennya ke lokasi jalan yang dapat dilalui truk pengangkut kelapa sawit dan memakan waktu yang lama sehingga jadwal panen dikebun berikutnya harus tertunda. Jika jadwal panen sudah tertunda maka masyarakat harus mengantarkan hasil panennya ke rumah toke sawit tersebut karena truk pengangkut berada di lokasi lain. Dari kejadian tersebutlah banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan dari pemerintah Desa dalam pembangunan serta pemeliharaan jalan yang menjadi akses penting dalam aktivitas masyarakat desa Buluh Manis.

Meskipun beberapa jalan sudah dilakukan pengerasan(Aspal dan Semenisasi) atau penimbunan jalan, ada beberapa lokasi jalan yang sudah hancur atau rusak namun belum ada bentuk pemeliharaan atau perbaikan jalan yang dilakukan pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah Desa. Seperti di *jalan Talang Pancah, Bayduri dan jalan Cucut* yang sampai pada bulan Juni 2019 belum juga mendapat perhatian dari pemerintah desa.

Perhatian pemerintah Desa juga harus terjuju pada bagian pembangunan infrastruktur saluran pembuangan air desa dan pemeliharannya, seperti yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Pembangunan Desa. Saluran pengaliran air sangat perlu untuk diperhatikan karna untuk mencegah terjadinya banjir yang nantinya bisa saja menyusahkan aktivitas masyarakat. Bukan hanya dalam pembangunannya saja, seharusnya pemerintah desa juga turut memperhatikan pemeliharaan infrastruktur desa lainnya, seperti bidang pendidikan, jembatan, dan bidang kesehatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan belum maksimal di laksanakan maka oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”**

1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathi Solapan sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan permasalahan utama dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor kendala dalam pembangunan infrastruktur di Desa Buluh manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?

2.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor kendala dalam pembangunan infrastruktur di desa Buluh Manis.

2.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian, pengetahuan serta wawasan peneliti akan bertambah. Selain itu, penulis bisa mengetahui kepuasan kerja dan kinerja pegawai dalam bentuk memberikan pelayanan serta faktor-faktor yang menghambatnya.

2. Bagi Lokasi Penelitian

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan kinerja dan pelayanan.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam segmen yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik.

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

2.5.1 Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian.

2.5.2 Bab II Landasan Teori

Berisi tentang teori teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan dalam pembuatan sistem.

2.5.3 Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal diantaranya :sampel penelitian,tempat penelitian,metode pengumpulan data,model penelitian definisi variabel,dan pengujian hipotesis.

2.5.4 Bab IV Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini diuraikan diantaranya berbagai hal,diantaranya: sejarah singkat obyek penelitian,letak geografis,visi dan misi,serta struktur organisasi.

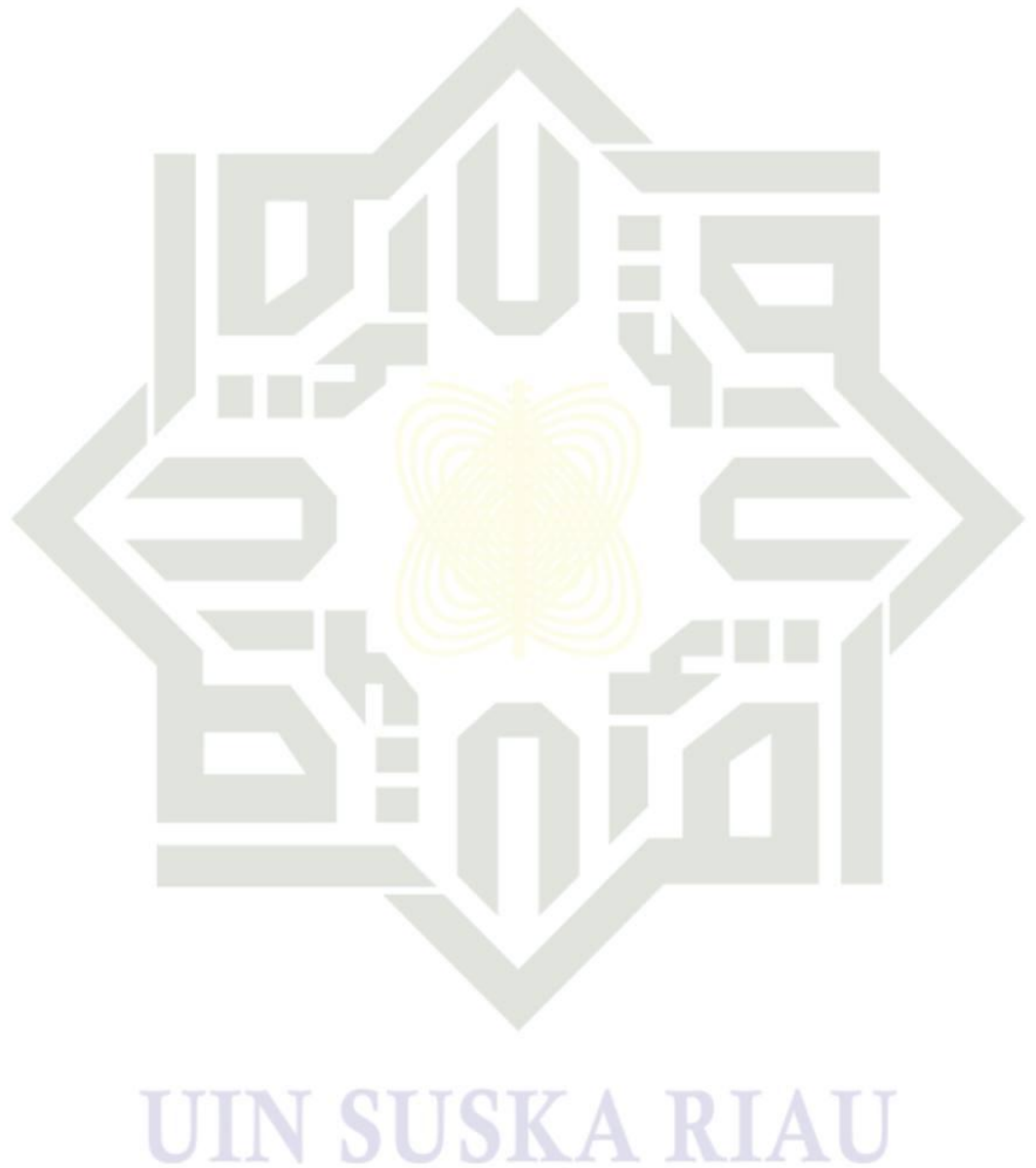
2.5.5 Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan berupa: menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta dan data,mengungkapkan dan menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan

tujuan penelitian ,dan membahas hasil penelitian secara mendalam yang didasari oleh argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

2.5.6 Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dan saran/revomendasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Administrasi Pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Apabila definisi diatas dimaknai secara cermat, akan muncul dipermukaan paling sedikit tujuh ide pokok. *Pertama:* pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat indenpenden akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dibutuhkan dalam pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. *Kedua:* pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai suatu yang akan dilaksanakan. *Ketiga* pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa mendatang. *Keempat* rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu kejangka waktu yang lain. *Kelima* pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan antarlain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, cara fikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. *Keenam* modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per definisi* bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketujuh* semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsabangsa lain didunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lainnya (Sondang P. Siagian 4:2003).

Dalam proses pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional dari masing-masing negara tersebut, banyak diantaranya negara-negara yang sedang berkembang tersebut berhasil merealisasikan tujuan nasionalnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi banyak pula yang mengalami kegoncangan-kegoncangan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai (Afifuddin, 2012:78).

Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dianggap berhasil, harus didasarkan seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakannya. Setiap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan terkait dengan pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan masyarakat.

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. *Pertama*, itu berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas”, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk dikembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. *Kedua*, ia mencakup “keadilan”, perhartian yang berat esbelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. *Ketiga*, penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentut maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.dan akhirnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan berarti perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya (Coralie Bryant dan Louise G, 1987:22).

2.2 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.

Menurut Kartasasmista (2001 : 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/ Kota, Provinsi dan nasional yang telah di tuangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam Masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa menetapkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Rostow (1971) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, Pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi 18 besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih.

Pembangunan desa merupakan proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Dengan berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan partisipasi masyarakat dengan bertujuan untuk menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan di desa tidak lepas dari anggaran dana yang menjadi aspek penting terlaksana atau tidaknya sebuah pembangunan. Hal ini juga sudah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
- d. Memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.

- g. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota.
- h. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa:

- 1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- 3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat di pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, saintasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Menurut Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Jenis infrastruktur menurut Peraturan Presiden No.122 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah sebagai berikut:

- a. Infrastruktur transportasi
- b. Infrastruktur jalan
- c. Infrastruktur pengairan
- d. Infrastruktur air minum
- e. Infrastruktur air limbah
- f. Sarana persampahan

- g. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika
- h. Infrastruktur ketenagalistrikan
- i. Infrastruktur minyak dan gas bumi
- j. Infrastruktur fasilitas pendidikan
- k. Infrastruktur kawasan
- l. Infrastruktur pariwisata, dan
- m. Infrastruktur kesehatan

Menurut Yusniah Anggraini (2018:04), istilah umum dari infrastruktur itu sendiri adalah merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa:

- Jalan
- Kereta Api
- Air bersih
- Bandara
- Kanal
- Waduk tanggul
- Pengelolaan limbah
- Perlistrikan
- Telekomunikasi, dan
- Pelabuhan.

Secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi dapat pula mendukung berupa kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dan jasa. Misalnya, jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman dan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur pada dasarnya dimaksudkan paling tidak untuk mencapai 3 *strategic goals*, yaitu: (Yusniah Anggraini, 2018:05)

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal, dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, perdesaan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, dan pulau-pulau kecil.

2.4 Perencanaan Pembangunan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa

perencanaan pembangunan bertaraf nasional adalah untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- f. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RenjaKL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 tahun.
- h. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarlaku, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e)menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya

masyarakat Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan juga merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.5 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta. Menurut Dr. Made Pidarta, partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. (Siti Irene, 2011:50)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- b. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya.
- c. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan.
- d. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- e. Partisipasi dapat dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental.
- f. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- g. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. (Siti Irene, 2011:55)

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan pembangunan sangat diperlukan, karena pembangunan yang berhasil harus

didukung oleh semua komponen bangsa, agar masyarakat memiliki rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Setidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan. Pembangunan mungkin hanya menyangkut suatu bidang kehidupan saja, namun mungkin dilakukan secara simultan terhadap berbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan (Siti Irene, 2011:105).

2.6 Otonomi Daerah

Haw Widjaja (2005:07) otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi Daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Tujuan dari otonomi Daerah adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini ialah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas pembantuan. Proses sentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi administratif pemerintahan daerah, tetapi berlaku pula pada masyarakat atau publik, dan badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Demikian pula dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta yang bersangkutan.

Desentralisasi telah lama dianut dalam negara Indonesia. Secara historis asas desentralisasi itu telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan adanya undang-undang desentralisasi tahun 1903. Secara empiris, asas tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi merupakan kontinum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini terjadi kecenderungan ke arah sentralisasi. Sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berusaha agar terjadi tendensi ke arah desentralisasi. Berdasarkan pengalaman empiris, desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Dari sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, dimana setiap daerah berhak mengatur sistem pemerintahannya sendiri dan diawasi oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah pusat. Dengan adanya Otonomi Daerah maka setiap pemerintahan yang ada di daerah juga mengalami perubahan termasuk juga Desa.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk diterapkan sebagai payung hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, dapat memberikan implikasi yang besar bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah termasuk juga pemerintahan desa. Dasar pemikiran dari Otonomi Daerah adalah bahwa Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan harus memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas Desentralisasi didalam penyelenggaraan pemerintah yakni dengan memberikan keleluasan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya, asas ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi : Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil yang bentuk dan susunannya ditetapkan oleh Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara serta hak asal usul didalam daerah yang bersifat istimewa. (Haw. Widjaja, 2003:1)

Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta buakan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Haw Widjaja, 2003: 165).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa merupakan satu-kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati (Haw. Widjaja, 2003:3).

Otonomi yang dimiliki oleh desa dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk atau heterogen, maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan didalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, dan keputusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala desa. Didesa dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tatacara dan prosedurnya pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau menerima keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, dan lain-lain sebagaimana dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Otonomi Desa adalah otonomi asli, yang memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan atas hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Otonomi Desa berikut dengan pengakuan segala hak Otonomi yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk langkah serius dalam memenuhi amanah UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan pengembangan Otonomi Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah Kabupaten atau Kota, Provinsi dan Nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan masyarakat dan potensi desa, susunan pemerintahan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan adat istiadat masyarakatnya.

Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumberdaya manusia potensial yang ada didesa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan seperti para pelaku ekonomi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga-tenaga potensial, lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, LKMD, karang taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh-tokoh agama.

Undang-undang No 06 Tahun 2014, menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 pasal 26 disebutkan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Perda, berdasarkan peraturan pemerintah. Kewenangan Desa menurut Undang-Undang No. 06 tahun 2014 pada pasal 19 tentang Desa adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota, dan
4. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 menegaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan Nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, sangat jelas bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan Desa, baik dalam bidang pelayanan, pengaturan maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam hubungannya dengan otonomi desa tersebut, Clive Day (Hanif Nurcholis) menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi dibidang bisnis, peradilan penduduk, dan tawar menawar masalah pajak dengan penguasa diatasnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas :

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
2. Unsur Pembantu Kepala Desa yaitu terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa.
 - b. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan.
 - c. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya seperti kepala Dusun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Pandangan Islam tentang Pembangunan

Sebuah pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, terutama rakyat pedesaan yang membutuhkan kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Kesuksesan dalam pembangunan infrastruktur di desa dibutuhkan pemerintah desa yang pro terhadap masyarakat desa agar program pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik. Potongan ayat 2 Qs. Al - Maidah menjelaskan:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah , sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (Qs. Al-Maidah 05:02).

Maksud dari ayat diatas adalah pembangunan infrastruktur di pedesaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa merupakan bentuk pertolongan untuk masyarakat, guna mensejahterakan masyarakatnya dalam membantu meringankan aktivitas masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa merupakan bukti bahwa pemerintah telah melaksanakan perintah Allah SWT seperti ayat yang tertera diatas, dimana pemerintah desa dan masyarakat saling tolong-monolong.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian lain yang masih dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahasiswa UIN SUSKA RIAU, **Bambang Suherman** tahun **2013**, jurusan **Administasi Negara** fakultas **Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau** dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Pesisir (studi kasus desa kubu I, Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2013)**”. Dalam skripsinya tersebut, peneliti mengemukakan masalah dalam penelitiannya, yakni bagaimana pelaksanaan pembangunan infrstruktur dan faktor apa yang menghambat proses pembangunan infrastruktur di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir? Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan infrstruktur dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat proses pembangunan infrastruktur di Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, peneliti mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kubu I dalam kategori yang Kurang Baik, hal ini dapat dilihat dari presentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 67,13% berdasarkan observasi an wawancara yang penulis lakukan ternyata pembangunan infrastruktur di desa Kubu I sangat rendah masih belum terlaksana dari perencanaan pemabngunan yang direncanakan oleh pemerintah desa.

Penelitian yang dilakukan oleh **Kamirudin** tahun **2014**, jurusan **Ilmu Administrasi Negara** fakultas **Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau** dengan judul “ **Analisis Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Gobah Kecamatan Tambang**

Kabupaten Kampar”. Dalam skripsinya tersebut, peneliti mengemukakan masalah dalam penelitiannya, yakni Bagaimanakah program pembangunan infrastruktur di desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar? Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pembangunan serta peningkatan infrastruktur desa Gobah.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan berdasarkan pengukuran terhadap tiga indikator yang telah diuraikan yaitu pembangunan infrastruktur dibidang pendidikan, pembangunan infrastruktur dibidang sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur dibidang kemashalatan masyarakat sudah berjalan dengan baik, dengan persentase 62,95%. Namun walaupun sudah dikatakan baik tetapi berdasarkan observasi yang telah dilakukan dilapangan dan wawancara masih terdapat kekurangan misalnya saja kekurangan dalam hal pembangunan itu sendiri adalah pembangunan yang tidak merata, pembangunan yang belum maksimal atau pembangunan yang tidak mendapati kucuran dana yang cukup sehingga untuk melakukan pembangunan yang maksimal belum juga bisa terlaksana. Kemudian yang menjadi kendala terkadang adalah masalah cuaca yang ada, jika musim hujan datang maka akan meluapnya sungai kampar dan itu akan menyebabkan pembangunan menjadi terhambat.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh **Nanang Hermanto** tahun **2018**, jurusan **Ilmu Administrasi Negara** fakultas **Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau** dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur di Desa**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”. Dalam skripsinya tersebut, peneliti mengemukakan masalah dalam penelitiannya, yakni Bagaimanakah proses pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun dan Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan program pembangunan di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun? Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tentang pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program pembangunan di desa Sungai Sebesi belum sesuai apa yang sudah direncanakan. Tahapan perencanaan sangat mempengaruhi tahapan pelaksanaannya. Seperti dalam membuat anggaran dana harus benar-benar diperhitungkan dan sangat detail agar pelaksanaan tidak terjadi masalah atau kendala. Pada proses pelaksanaannya masyarakat desa Sungai sebesi kurang berpartisipasi dan mengawasi proses pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa sungai sebesi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program pembangunan di Desa Sungai Sebesi ini adalah perencanaan yang kurang baik sehingga dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai antara perencanaan dengan diwaktu pelaksanaannya. Salah satunya adalah dalam membuat atau menentukan anggaran dananya. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa juga menjadi salah satu penghambat proses pembangunan, karena sosiaisasi atau komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar tersedia dengan sukarela ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan dalam pembangunan di desa.

Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh **Hafis Mulyadi** tahun **2018**, jurusan **Ilmu Administrasi Negara** fakultas **Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau** dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”**. Dalam skripsinya tersebut, peneliti mengemukakan masalah dalam penelitiannya, yakni Bagaimanakah pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan Faktor apa yang menghambat proses pembangunan infrastruktur di desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar? Dengan tujuan penelitian Untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar pada tahun anggaran 2018 dan Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Sawah sangat Rendah masih belum terlaksanakan dari perencanaan pembangunan yang direncanakan Oleh pemerintah desa serta terdapat hambatan dalam melaksanakan pembangunan

infrastruktur diantaranya hambatan dana dan Kondisi alam yang kurang mendukung.

2.10 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut :

1. Otonomi Desa adalah otonomi yang asli, bulat dan utuh serta buakan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Haw Widjaja, 2003: 165).
2. Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. (Sondang P. Siagian. 2003: 4).
3. Pembangunan pendidikan ialah untuk mencerdaskan kehidupan dan mengembangkan pola pikir masyarakat.
4. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. (PerPres No. 38 tahun 2015)

2.11 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa	1. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur lingkungan desa	a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman b. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian d. Pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat e. Sumber dana pembangunan infrastruktur
		f. Partispasi masyarakat dalam pembangunan serta pemeliharaan
	2. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan	a. Penyediaan air bersih berskala desa b. Ketersediaan ambulance desa c. Tersedianya bangunan gedung pelayanan kesehatan desa seperti, posyandu atau puskesmas desa d. Sumber dana pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

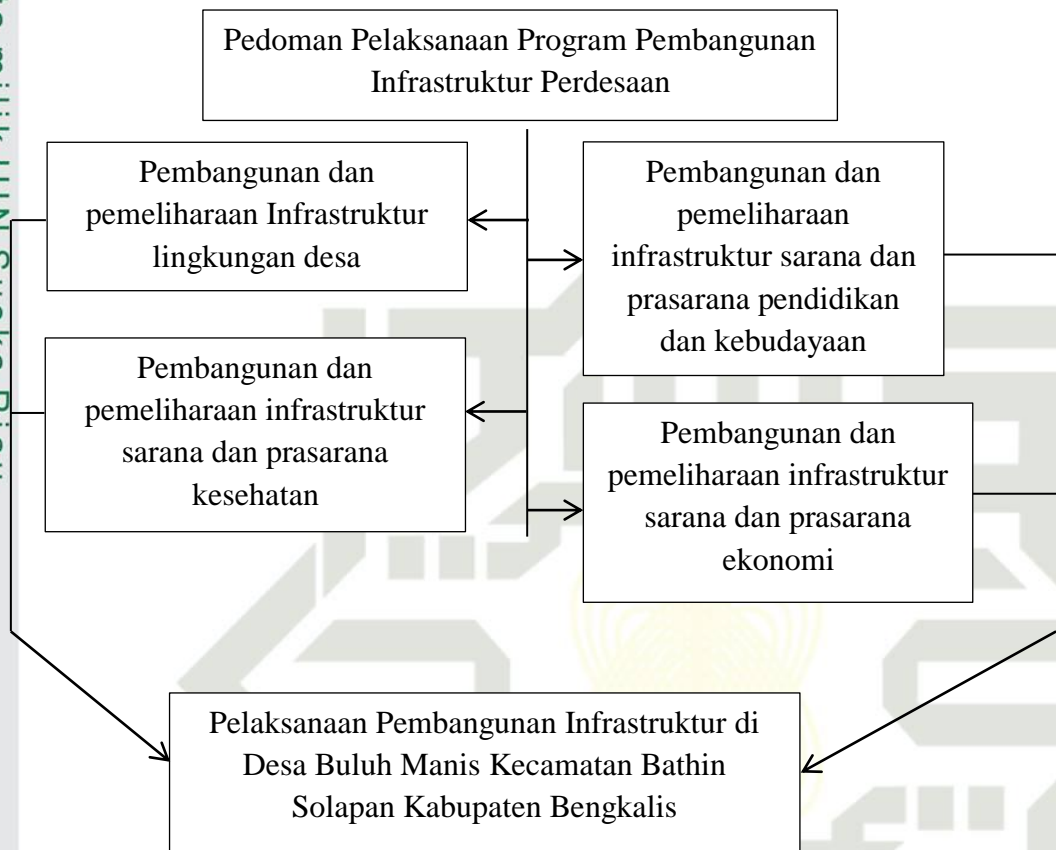
	3. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	a. Ketersediaan bangunan sekolah yang memadai b. Tersedianya perpustakaan desa yang memadai / taman bacaan masyarakat c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kesenian dan olah raga siswa d. Partispasi masyarakat dalam pembangunan e. Sumber dana pembangunan
	4. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana ekonomi	a. Tersedianya sarana dan prasarana pasar desa b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan c. Sumber dana pembangunan

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis pada Desa Buluh Manis kecamatan Bathin Solapan.

3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari pengajuan judul pada bulan Januari 2019. Kemudian selanjutnya penulisan proposal yang dilakukan pada waktu yang sama hingga dianggap layak untuk diseminarkan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer langsung dari kantor Kepala Desa Buluh Manis kecamatan Bathin Solapan dan data hasil tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Buluh Manis kecamatan Bathin Solapan yang didapatkan melalui angket maupun wawancara.

3.2.2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian atau dari pihak lain yang terkait dengan objek yang diteliti. Data ini bisa diperoleh dari studi pustaka berupa buku, referensi, dokumen, dan sebagainya yang berfungsi untuk melengkapi data primer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3. Metode Pengumpulan Data**3.3.1. Wawancara**

Yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian (Marzuki, 2005). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan merupakan cara memperoleh data yang bersifat langsung.

3.3.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sekumpulan berkas yakni berupa foto-foto pada saat penelitian dilaksanakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.

3.4. Informan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000: 97). Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Incidental Sampling (Sampling Insidental). Incidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2001 : 60).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	1 Orang
4.	Kepala Urusan (KAUR) pembangunan	1 Orang
5.	Masyarakat	
	- Tokoh Masyarakat	3 Orang
	- Kepala Dusun	3 Orang
	- RW	4 Orang

3.5. Metode Analisis

Analisa yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara Deskriptif kualitatif (menggambarkan dan memaparkan) pelaksanaan pembangunan desa di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka kemudian data tersebut akan diolah secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan data tersebut diklasifikasikan dalam bentuk tabel-tabel persentase dan penjelasan-penjelasan, kemudian hasil dari pembahasan ini dirumuskan suatu kesimpulan. Data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif analitis yaitu suatu analisa yang menggambarkan atau menceritakan secara jelas berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Kecamatan Bathin Solapan

Kecamatan Bathin Solapan merupakan pemekaran dari kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 yang diresmikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh bupati Bengkalis dan Staf Ahli Gubernur Riau. Kecamatan Bathin Solapan termasuk kedalam Kabupaten Bengkalis, yang luas wilayahnya 757,47 km² (BPS Kab. Bengkalis).

Kecamatan Bathin Solapan dengan pusat pemerintahan berada di desa Sebangar. Setelah pemekaran, kecamatan Bathin Solapan terdapat 13 Desa/Kelurahan, antara lain sebagai berikut :

- a. Buluh Manis
- b. Petani
- c. Tambusai Batang Dui
- d. Simpang Padang
- e. Pematang Obo
- f. Balai Makam
- g. Air Kulim
- h. Boncah Mahang
- i. Sebangar
- j. Pamesi
- k. Bumbung

- l. Kesumbo Ampai
- m. Bathin Sobanga

Berdasarkan laporan hasil Kependudukan sampai dengan Bulan Desember 2018 jumlah Penduduk Kecamatan Bathin Solapan berjumlah 111.132 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bathin Solapan Menurut Desa/Kelurahan 2018

No	Desa / Kelurahan	Jumlah		Penduduk		
		RT	RW	L	P	L+P
	1	2	3	4	5	6
1	Petani	44	7	4351	4026	8377
2	Air Kulim	35	10	3758	3523	7281
3	Buluh Manis	27	8	2947	2837	5784
4	Bumbung	15	5	3835	3539	7374
5	Pamesi	0	0	1702	1534	3236
6	Kesumbo Ampai	19	5	2352	2145	4497
7	Bathin Sobanga	0	0	1915	1773	3688
8	Sebangar	43	10	5826	5422	11248
9	Boncah Mahang	28	5	6597	6291	12888
10	Balai Makam	67	12	6386	5822	12208
11	Tambusai Batang Dui	25	5	6650	6127	12777
12	Simpang Padang	34	6	7618	7177	14795
13	Pematang Obo	26	6	3670	3309	6979
JUMLAH		336	71	57.607	53.525	111.132

Sumber: UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bathin Solapan

Dari data table diatas terlihat penduduk Desa/Kelurahan Simpang Padang sebanyak 14. 795 jiwa, yang merupakan penduduk terbesar di Kecamatan Bathin Solapan dan Desa/Kelurahan Bocah Mahang merupakan Desa/Kelurahan kedua yang terbesar jumlah penduduknya yaitu 12.888 jiwa, sedangkan Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 3.236 jiwa merupakan penduduk terkecil di Kecamatan Bathin Solapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Gambaran Umum Desa Buluh Manis**A. Kondisi Demografi**

Desa Buluh Manis terletak di kecamatan Bathin Solapan dengan luas wilayah 280,5 km², serta jarak ke Kecamatan 20 km dan jarak ke Kabupaten 194 km.

Jumlah penduduk Desa Buluh Manis yaitu sebanyak 4.603 jiwa dan terdapat 1.263 Kepala Keluarga (KK) dengan mata pencaharian mayoritas di desa ini adalah Petani dan penduduk yang lain bermata pencaharian Wiraswasta, Bidan, Peternak, Pedagang, Buruh, Guru, PNS. Pemerintahan Desa Buluh Manis saat ini dikepalai oleh Legimun.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Buluh Manis tahun Berdasarkan Jenis Kelamin 2018

Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
2.330	2.273	4.603

Sumber: Kantor Kepala Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan

B. Keadaan Sosial

Pendidikan Masyarakat di Desa Buluh Manis terdiri dari tidak tamat SD/MI. Tamat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, Diploma I-III, S1 dan S2.

Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Buluh Manis:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Buluh Manis Berdasarkan Pendidikan tahun 2018

No	Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Tidak Tamat SD/MI	87
2	SD/MI	1.273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	SMP/MTs	627
4	SLTA/MA	681
5	Diploma I – III	37
6	Strata 1 (S1)	22
7	Strata 2 (S2)	1
Total		2.728

Sumber: Kantor Kepala Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Buluh Manis Berdasarkan Pekerjaan tahun 2018

No	Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
1	Petani	592
2	Wiraswasta	497
3	Bidan	5
4	Pedagang	4
5	Peternak	14
6	Buruh	85
7	Guru	39
8	PNS	14
Total		1.250

Sumber: Kantor Kepala Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan yang banyak dimiliki oleh masyarakat desa Buluh Manis adalah sebagai Petani dan terbanyak kedua adalah sebagai Wiraswasta. Sedangkan yang paling sedikit adalah sebagai pedagang.

C. Kelembagaan**1) Pemerintahan**

- Badan Permusyawaratan Desa : 1 unit
- Dusun : 3 unit
- RW : 8 unit
- RT : 27 unit

- LKMD : 1 unit
- Karang Taruna : 1 unit

Berikut struktur Pemerintah Desa Buluh Manis beserta tugas dan fungsinya:

a. Kepala Desa

Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan desa

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa

c. Sekretaris Desa

Perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantua persapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk pelaporan penyelenggaraan pemerintahbdsa serta melaksanakan tugas lainyang diberikan kepala desa.

d. Pelaksana Teknis Desa

- Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

- Kepala Urusan Pembangunan (KUR PEMBANGUNAN)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

- Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

e. Pelaksana Kewilayahan

Kepala Dusun

Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

Administrasi Desa

Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Jenis dan bentuknya menurut peraturan menteri dalam negeri ada 5 yaitu :

- Administrasi Umum, berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa.
- Administrasi Penduduk, berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk.
- Administrasi Keuangan, berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.
- Administrasi Pembangunan, berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

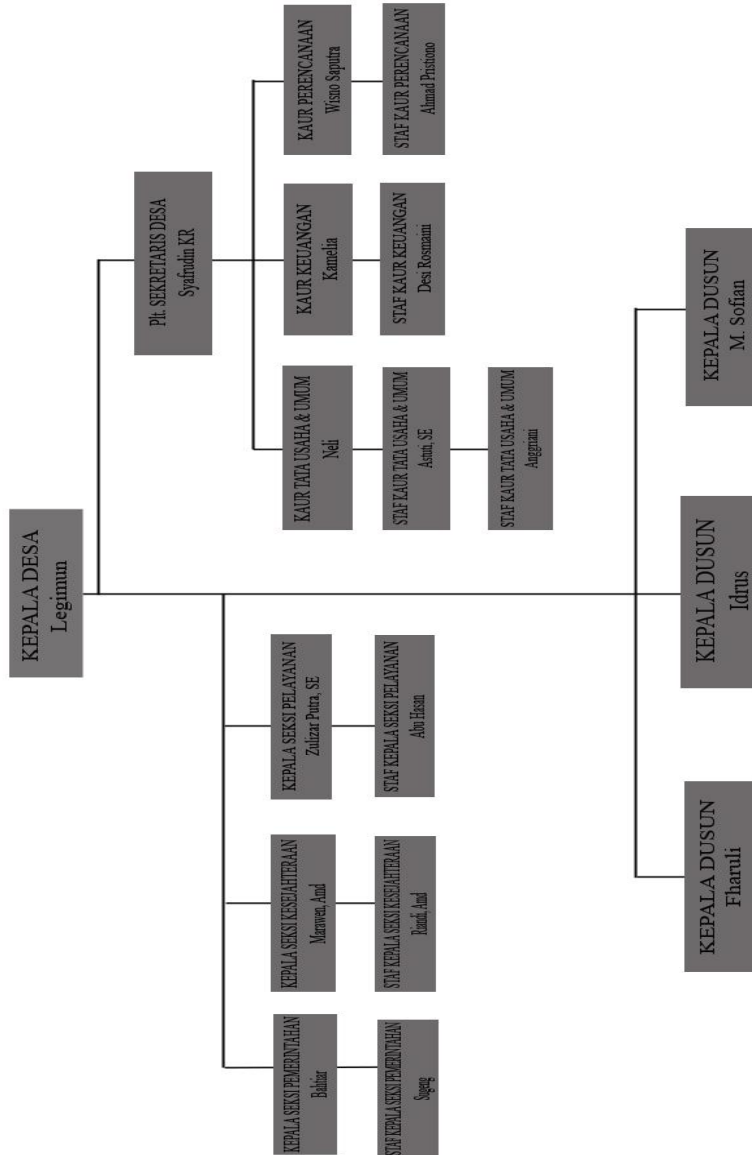
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa
Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan
Kabupaten Bengkalis

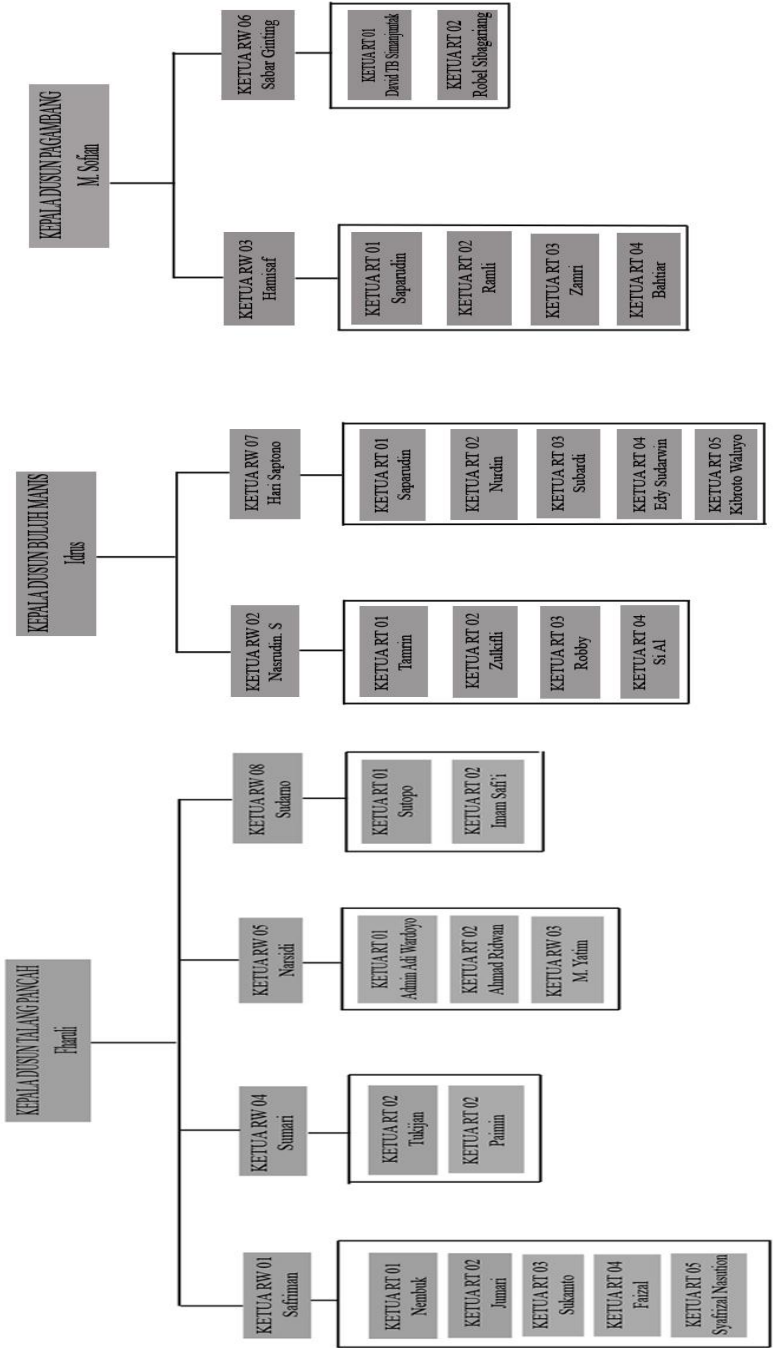


Sumber: Kantor Kepala Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRUKTUR LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RT/RW - SEDESA BULUH MANIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN



Sumber: Kantor Kepala Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis

2) Ekonomi

- Usaha Ekonomi Desa

: 1 unit

3) Kesehatan

- Posyandu : 5 unit

4) Keagamaan

- Panitia Hari Besar Islam (PHBI) : 7 buah
- Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) : 1 buah

5) Adat

- Lembaga Adat : 1 unit

6) Keamanan

- Linmas Desa : 1 unit

7) Pendidikan

- Komite Sekolah : 3 unit
- Yayasan : 2 unit

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan hal yang sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat desa Buluh Manis guna meringankan aktivitas keseharian masyarakat. Berikut daftar sarana dan prasarana yang ada di desa Buluh Manis:

Tabel 4.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Buluh Manis tahun 2018

Jenis Sarana dan Prasarana	Sub Sarana dan Prasaran	Jumlah
A. Perhubungan	1. Jalan Tanah	34 km
	2. Jalan Aspal	3 km
	3. Jembatan	3 unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pasar	1. Pasar Umum	2 unit
	2. Warung	40 unit
	3. Rumah Makan	7 unit
C. Pendidikan	1. Sekolah Dasar	3 unit
	2. Madrasah/MDA	4 unit
	3. TK/RA	4 unit
D. Sosial & Pemerintahan Desa	1. Lapangan	3 unit
	2. Pemakaman	4 unit
	3. Kantor Desa	1 unit
E. Keagamaan	1. Masjid	8 unit
	2. Musholah	12 unit
	3. Gereja	2 unit
F. Kesehatan	1. Balai Pengobatan	5 unit
G. Keamanan	1. Pos Kemanan	25 unit

Sumber: Kantor Kepala Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan

E. Rincian Dana Desa Buluh Manis

Setiap kegiatan pembangunan baik itu setingkat Provinsi, Kabupaten Kecamatan atau bahkan Pedesaan, semuanya memerlukan anggaran dana yang harus mereka miliki karena dana adalah patokan penting agar pembangunan dapat terlaksana. Tanpa dana, pembangunan hanya sebatas perencanaan yang belum matang. Berikut dibawah ini adalah rincian dana yang terdapat di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis:

Tabel 4.6 Pendapatan Desa Buluh Manis

Tahun	Pendapatan	Jumlah Pendapatan (Rp)
2018	Pendapatan Asli Desa	11.530.400.00,-

	Pendapatan Transfer	3.530.760.240.00,-
	Total	3.542.290.640.00,-
	Pendapatan Asli Desa	11.897.319.00,-
	Pendapatan Transfer	3.741.672.141.00,-
	Total	3.753.569.460.00,-
	2019	

Sumber: Info Grafis APBDes Buluh Manis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Pendapatan Asli Desa berjumlah Rp 11.530.400 dan Pendapatan Transfer merupakan dana yang berasal dari kabupaten Bengkalis untuk desa Buluh Manis berjumlah Rp 3.530.760.240, maka total dana yang dimiliki desa Buluh Manis pada tahun 2018 berjumlah Rp 3.542.290.640. Kemudian pada Pendapatan Asli desa itu sendiri adalah berjumlah Rp 11.897.319 dan Pendapatan Transfer berjumlah Rp3.741.672.141, maka dana yang dimiliki oleh desa Buluh Manis pada tahun 2019 adalah berjumlah Rp 3.753.569.460

Tabel 4.7 Rincian Anggaran di bidang Pembangunan Desa Buluh Manis tahun 2018

No	Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Anggaran Pembangunan (Rp)	No	Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Anggaran Pembangunan (Rp)
1	Lanjutan Balai Pertemuan	Kantor Desa	179.580.617.00,-	9	Parit Bata	Jl. PPN RT 04 RW 01	128.674.070.00,-
2	Parit Beton	Jl. Sukajadi RT 03 RW 01	75.880.350.00,-	10	Galian Parit	Jl. Sepakat Desa Buluh Manis	166.816.000.00,-
3	Parit Bata	Jl. Cucut RT 01 RW 06	40.540.234.00,-	11	Pengadaan Buku/Pustaka Desa	Kantor Desa	28.970.817.00,-
4	Pengerasan Base C	Jl. Talang Pancha II RT 01 RW 05	160.350.400.00,-	12	Parit Bata	Jl. Rangau Km. 14 RT 04 RW 02	126.740.080.00,-
5	Pengerasan Base C	Jl. Talang Pancha I RT 01 RW 05	147.326.400.00,-	13	Penimbunan Badan Jalan	Jl. Bayduri RT 02 RW 04	14.370.560.00,-
6	Pengerasan Base C	Jl. Bayduri RT 02 RW 04	147.326.400.00,-	14	Parit Bata	Jl. Rangau Km. 15 RT 02 RW 02	122.730.445.00,-
7	Parit Bata	Jl. Lapangan Heli RT 03 RW 07	128.674.070.00,-	15	Penimbunan Badan Jalan	Jl. Talang Pancha RT 02 RW 04	27.574.377.00,-
8	Box Culvert	Jl. Grojokan RT 04 RW 07	41.796.300.00,-	16	Penimbunan Badan Jalan	Jl. Campu Kota RT 03 RW 05	17.320.450.00,-
TOTAL: 1.554.471.570							

Sumber: Kantor Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis

Dari table di atas dapat dilihat bahwa ada 16 poin kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Buluh Manis pada tahun 2018 dengan total anggaran Rp 1.554.471.570.

Tabel 4.8 Rincian Anggaran di bidang Pembangunan Desa Buluh Manis tahun 2019

No	Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Jumlah Anggaran (Rp)	No	Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Jumlah Anggaran (Rp)
Saya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	Lanjutan Balai Pertemuan	Kantor Desa	179.580.617.00,-	11	Penimbunan Jalan	Jl. Talang Pancha I RT 03 RW 05	147.326.400.00,-
	Semenisasi Jalan	Jl. Pinang Manis RT 02 RW 03	100.362.080.00,-	12	Pembangunan Gapura Permanen	Jl. Talang Pancha I RT.03 RW.05	19.456.805.00,-
	Semenisasi Jalan	Jl. Musholah RT.01 RW.02	88.225.280.00,-	13	Pengadaan Buku/Pustaka Desa	Kantor Desa	28.970.000.00,-
	Pembangunan Parit Beton	Jl. Rangau km13 RT 01 RW 07	89.088.480.00,-	14	Parit Bata	Jl. Rangau Km. 14 RT 04 RW 02	131.674.178.00,-
	Pengerasan Jalan Base C	Jl. Talang Pancha III RT 01 RW 05	150.450.500.00,-	15	Penimbunan Badan Jalan	Jl. Bayduri RT 02 RW 04	147.326.400.00,-
	Pembuatan Menara Tangki Air	Jl. Rangau km.11 RT 01 RW 01	17.668.350.00,-	16	Parit Bata	Jl. Rangau Km. 15 RT 02 RW 02	128.455.000.00,-
	Pembangunan Pos Siskamling	Jl. Talang Pancha III RT 02 RW 04	16.224.070.00,-	17	Galian Parit	Jl. Sepakat Desa Buluh Manis	166.816.000.00,-
	Pembuatan Sumur Bor dan Menara Air	Jl. Lapangan Heli RT.04 RW.07	41.580.590.00,-	18	Penimbunan Badan Jalan	Jl. Talang Pancha II RT 02 RW 04	27.453.000.00,-
	Pengadaan Ambulance	Kantor Desa	420.573.870.00,-	19	Penimbunan Badan Jalan	Jl. Campu Kota RT 03 RW 05	19.650.078.00,-
10	Pembangunan Posyandu Mawar Putih	Jl. Sukajadi RT.02 RW.01	64.253.883.00,-				
TOTAL: 1.985.135.581.00,-							

Sumber: Kantor Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis

Dari table di atas dapat dilihat bahwa ada 19 poin kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Buluh Manis pada tahun 2019 dengan total anggaran Rp 1.985.135.581.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.9 Jenis Pendapatan Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis

No	Jenis Pendapatan	Jumlah Pendapatan (Rp)
1	Dana Desa (DD)	3.753.559.460,00-
2	Alokasi Dana Desa (ADD) -Dari Provinsi untuk Kabupaten -Dari Kabupaten ke Desa	131.071.696.000,00- 3.741.672.141,00,-
3	Pajak	87.692.988,00,-
4	Retribusi	16.224.070,00,-

Sumber: Kantor Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis

Pada table diatas terlihat bahwa Dana Desa berjumlah Rp 3.753.559.460, selanjutnya pada rincian Alokasi Dana Desa (ADD) terbagi menjadi 2 yakni dari Provinsi untuk Kabupaten berjumlah Rp 131.071.696.000 dan dari Kabupaten ke Desa berjumlah Rp 3.741.672.141. kemudian pada bagian Pajak berjumlah Rp87.692.988.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang *pertama*, pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Buluh Manis tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah desa. Untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dapat diindikasikan terlaksana dengan baik. Meskipun tidak sepenuhnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan menjadi wewenang pemerintah desa, namun pemerintah desa Buluh Manis dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan lainnya untuk masyarakat desa seperti posyandu dan ambulance desa, serta perencanaan pembangunan perpustakaan desa, namun berbanding terbalik pada pembangunan sarana dan prasarana lingkungan desa serta pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, pembangunan dibidang ini belum dapat terlaksana dengan baik oleh pemerintah desa Buluh Manis. Karena dilihat dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2018 dan 2019 ada separuh kegiatan pembangunan oleh pemerintah desa belum dapat dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, tidak terlaksananya sebuah perencanaan pembangunan tentunya ada hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Buluh Manis. Hambatan tersebut berupa seperti:

- Terbatasnya akses dan ketersediaan prasarana dan sarana
- Kurangnya pemanfaatan teknologi akibat rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan
- Lemahnya keterkaitan kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan untuk menunjang sistem jaringan agribisnis
- Kondisi Keuangan/Dana Desa, dan
- Kondisi iklim

Hal tersebutlah yang membuat beberapa kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tidak dapat dilaksanakan di desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Buluh Manis adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah desa harus benar-benar memperhitungkan apa saja yang menjadi kendalanya sehingga dapat ditemukan dengan cepat solusinya. Serta harus dipersiapkan dan paham terhadap dana dan kondisi alam. Karena dana dan kondisi alam sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan.
- b. Pemerintah desa harus tetap terus memberikan perhatian besar pada Infrastruktur yang sudah dibangun karena infrastruktur tersebut

membutuhkan perawatan /pemeliharaan agar masyarakat dapat tetap menikmatinya.

- c. Untuk semua masyarakat harus tetap selalu bergotong royong untuk memperbaiki jalan jika jalan ada rusak ataupun sarana desa yang dianggap diperlukan bagi kepentingan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Stagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan strateginya*. Sinar Grafika Offset.
- Briyant, Coralie dan Louis G. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Alifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasi di Era Reformasi*. Alfabeta, cv.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT. Rajagrafindo Persada
- Anggraini, Yusniah. 2018. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Indocamp
- Suherman, Bambang. 2014. *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Daerah Pesisir (Studi Kasus: Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir*. Jurusan Administrasi Negara, fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kamirudin. 2014. *Analisis Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Jurusan Administrasi Negara, fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rosalina, Maya. *Kiberja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*. e-Jurnal.
- Asnudin, Andi. *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Perlibatan Masyarakat Setempat*. e-Jurnal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berlin, Yuanita. Noor, Irwan. Siswidiyanto. *Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Lokasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo*. e-Jurnal.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Peneyediaan Infrastruktur Prioritas

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaen Bengkalis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemrintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Rencana Kerja Pembangunan (RKPDDes) Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2018

Rencana Kerja Pembangunan (RKPDDes) Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2019

Data Monografi Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2018



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI FOTO



(Gambar: Puskesmas Pembantu / PUSTU di Jl. Rangau Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis)



(Gambar: Jembatan yang dibangun oleh Pemerintah Desa Buluh Manis)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar: Jalan penghubung wilayah pemukiman warga dengan wilayah perkebunan milik masyarakat Buluh Manis)



(Gambar: Jalanan di wilyah pemukiman yang sudah diaspal)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar: Jalanan di Wilayah pemukiman pendudukan yang belum diaspal/pengerasan)



(Gambar: Parit saluran pembuangan air di wilayah pemukiman warga)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar: Sekolah Dasar Negeri yang ertempat di Desa Buluh Manis)



(Gambar: wawancara dengan Kepala Desa Buluh Manis, Bapak Legimun)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar: Wawancara dengan Ketua BPD Buluh Manis, Bapak Juprizal)



(Gambar: Wawancara dengan KAUR Pembangunan Desa Buluh Manis)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar: Wawancara dengan Kepala Dusun Pagambang, Kepala Dusun Buluh Manis, dan Kepala Dusun Talang Panchah)



(Gambar: Wawancara dengan Ketua RW 05 Desa Buluh Manis)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Buluh Manis)



(Gambar: Wawancara dengan Ketua RW 03 Desa Buluh Manis)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Gambar: Wawancara dengan guru Sekolah Dasar Negeri yang bertempat di Desa Buluh Manis)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4393/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 15 Juli 2019 M
12 Zulqaidah 1440 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ahmad Junaidi
NIM. : 11575103037
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Buluh Manis
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis" Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN DESA BULUH MANIS

JL. RANGAU KM. 15

KODE POS 28884

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 244 / SK/ BM / XII / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

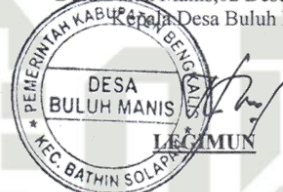
Nama : LEGIMUN
Jabatan : Kepala Desa Buluh Manis

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD JUNAIDI
Nim : 11575103037
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan
Kabupaten Bengkalis
Lokasi Penelitian : Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan

Demikianlah surat Keterangan ini dibuat sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di pgunakan seperlunya.

Desa Buluh Manis, 02 Desember 2019



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/25083
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4393/2019 Tanggal 15 Juli 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

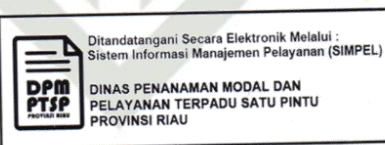
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : AHMAD JUNAIDI |
| 2. NIM / KTP | : 11575103037 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BULUH MANIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BULUH MANIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Agustus 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- (4) Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Saya **Ahmad Junaidi, S.Sos**, lahir pada tanggal 06 Juni 1996 Labuhanbatu Selatan (Labusel), saya anak ke-7 dari pasangan ayahanda Sutikno dan ibunda Ratiyem, kami terdiri dari 7 bersaudara 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Penulis berasal dari desa Sei Daun Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Pendidikan formal yang penulis dari jenjang dari jenjang Sekolah Dasar Swasta (SDs) Widiya Dharma PT. Asam Jawa Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan lulus pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Subulussalam Sumberjo Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan lulus ditahun 2012, selanjutnya melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Widiya Dharma PT. Asam Jawa Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan lulus pada tahun 2015.

Setelah lulus SMA, penulis pindah ke kota Duri kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan melanjutkan studi ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) kota Pekanbaru di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara. Pada tahun 2018 di bulan Februari penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor RTD Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis selama 2 bulan. Kemudian di bulan Juli tahun 2018 penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama hampir 2 bulan di desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana, penulis membuat sebuah tugas akhir berupa Skripsi dan melakukan penelitian di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan judul penelitian “ *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis*”. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan studi kurang lebih lima tahun dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) tepat pada tanggal 22 April 2020.